PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENYUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DESA KEMIRI BARAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

M. Arif Irfanda[1]*, Rahmat Sudrajat[2]

[1] Universitas PGRI Semarang, Indonesia, arifirfanda852@gmail.com
[2] Universitas PGRI Semarang, Indonesia, rahmatsudrajat@upgris.ac.id
* Correspondence

Keywords: The Role of Community Figures, Organizing Reginonal Head Elections

Abstract

This research draws upon limited involvement of community leaders in providing political education to citizens during the Regional Head Election in Kemiri Barat Village, despite their strategic position in influencing public participation. The aim of this research to describe community leaders in supporting the success of local elections through the perspectives of deliberative democracy, rational consensus, communicative action, public sphere engagement, popular sovereignty, and legitimacy of authority. This study employs a descriptive qualitative method utilizing a case-study design. Data are gathered via interviews, observations, and document analysis and validated using methodological and source triangulation. The results show that community leaders play a significant role by facilitating public discussion forums, encouraging rational dialogue based on factual information, fostering communicative interactions that enhance political understanding, and serving as trusted sources of information regarding candidates and electoral procedures. They also contribute to safeguarding voters' freedom of choice and act as intermediaries for conveying public aspirations to relevant authorities. However, challenges remain, particularly the lack of intensive outreach to young voters and the leaders' limited proactive efforts to disseminate political education beyond formal forums, resulting in uneven political awareness among residents. This study recommends continuous political education by community leaders, improved information access from village authorities, and greater initiative from young voters in seeking credible political information.

Kata kunci: *Peran Tokoh Masyarakat, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi politik kepada warga pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Desa Kemiri Barat, meskipun posisi tokoh masyarat dianggap strategis dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Melalui Penelitian peneliti ingin mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam menyukseskan Pilkada, khususnya dalam perspektif demokrasi deliberatif, konsensus rasional, tindakan komunikatif, ruang publik, kedaulatan rakyat, dan legitimasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui; wawancara, observasi, dan dokumentasi, keabsahan data menerapkan triangulasi teknik dan sumber. Berdasarkan pada Penelitian diketahui tokoh masyarakat berperan dalam menyediakan ruang diskusi publik, mengarahkan dialog secara rasional berdasarkan data dan fakta, membangun interaksi komunikatif yang mendorong pemahaman politik, serta menjadi rujukan utama dalam penyampaian informasi terkait calon dan proses pemilihan. Tokoh masyarakat juga membantu menjaga kebebasan memilih tanpa tekanan serta menjadi perantara aspirasi warga kepada pihak terkait. Namun, penelitian menemukan kendala berupa kurangnya pendekatan intensif kepada pemilih muda dan kurangnya proaktivitas tokoh dalam memberikan edukasi di luar forum resmi, sehingga pemahaman politik masyarakat belum merata. Penelitian ini menyarankan agar tokoh masyarakat meningkatkan edukasi politik secara berkelanjutan, pemerintah desa memperluas akses informasi, serta pemilih muda lebih aktif mengakses sumber informasi yang kredibel.

A. Pendahuluan

Sistem demokrasi ialah sistem yang dianut oleh Negara Indonesia dengan rakyat sebagai pemegang penuh atas kekuasaan, sebagai negara yang menganut hal tersebut tentunya memiliki ciri khas yaitu Pemilu (Pemilihan Umum). Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Telaumbanua, 2022). Regulasi dari UU RI No.22 Tahun 1999 dan diperkuat oleh UU RI No. 32 Tahun 2004 yang berisikan mengenai Pemerintahan Daerah dan Hak Otonomi Daerah. Dengan demikian, daerah diberikan kebebasan untuk mengelola urusannya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat agar mengelola daerahnya masing-masing, selain itu hak otonomi daerah sering disebut dengan Desentralisasi.

Pilkada serentak merupakan Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat, dilakukan secara bersamaan di daerah Indonesia (Sumual, Telly, Siar, 2021). Kegiatan ini bertujuan untuk memilih pemimpin yang sah secara administratif di daerah menggunakan mekanisme yang sudah ditetapkan diberbagai tingkatan seperti Wali kota ditingkat Kota, Bupati ditingkat Kabupaten dan Gubernur ditingkat Provinsi. Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, karena melalui Pilkada pemerintah mengorganisir pemilihan pemimpin daerah untuk memastikan adanya mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan. Melalui kegiatan ini kepala daerah dapat dipilih langsung oleh rakyat, adapun dalam pemilihan daerah sangat erat kaitannya dengan partai politik (Windisari & Wahyuliana, 2022).

Tingkat kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik menjadi indikator keberhasilan demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Kesadaran tersebut mendorong munculnya partisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik sebagai bentuk penyaluran

kepentingan publik ke dalam sistem politik (Hemafitria, Novianty & Fitriani 2021).

Menurut pendapat (Jupendri, 2021) Pemilih pada saat sekarang sebagian besar merupakan generasi muda yang dimana masih diangka usia produktif hal ini menjadi sebuah bentuk dari bonus demografi. Hadirnya pemilih muda dari Gen Z dan Gen Y yang mendasarkan pilihannya pada idealisme dan rasionalitas dapat meningkatkan mutu pemilih di negara kita. Dalam menentukan pilihan politiknya, pemilih sering terpengaruh oleh pilihan orang di sekitarnya seperti keluarga atau teman sekelompoknya, para pemilih pemula khususnya yang tinggal di pedesaan mayoritas mengikuti pilihan orang tua atau tokoh yang dihormati di lingkungannya (Khakim, 2023). Pemilih muda banyak yang belum tentu memahami secara keseluruhan terkait dengan partisipasi yang dilakukan ketika pemilihan kepala daerah berlangsung terutama bagaimana cara memilih dengan menggunakan analisis berdasarkan *riset* yang tepat apalagi berbagai latar belakang dan pemikiran yang berbeda.

Darmawan, (2018:13) menyatakan bahwa tokoh Melayu memiliki peran signifikan dalam Pilkada Palembang, terutama melalui pengaruh adat dan tokoh agama yang mampu meningkatkan elektabilitas calon. Dinamika politik lokal turut memperkuat peran tersebut dalam menentukan hasil pemilihan. Sedangkan menurut pendapat (Meyliana dan Erowati, 2020) turunnya partisipasi masyarakat Pilkada Tana Toraja Thn 2020 disebabkan oleh minimnya kesadaran politik, kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam menangani potensi konflik antara pendukung, serta kondisi pandemi Covid-19 yang menjadikan masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya.

Keadaan ini menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat dapat mempengaruhi jalannya demokrasi dan penyelenggaraan Pilkada di Desa Kemiri Barat. Namun, masih terdapat tokoh yang kurang berkontribusi secara aktif dalam memberikan edukasi dan informasi politik kepada masyarakat. Seharusnya tokoh masyarakat lebih proaktif

menjembatani kebutuhan informasi warga dan mendorong mereka menjadi pemilih yang bertanggung jawab dan berintegritas, sehingga partisipasi politik tidak hanya sebatas menggunakan hak suara, tetapi dilakukan secara sadar tanpa tekanan maupun kepentingan pihak lain.

Perlu adanya dukungan dari berbagai komponen masyarakat untuk mencegah hal-hal negatif terjadi, partisipasi aktif dari masyarakat harus sebanding apalagi terkadang masih pasif dan kurang keterbukaan terkait politik dan mekanisme pemilihan dengan baik, tertib dan berkualitas. Perlu adanya peran tokoh masyarakat yang ada di desa sebagai orang pertama yang berdampingan dan bersosialisasi secara langsung untuk mengedukasi masyarakat serta memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat.

Metode

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dengan maksud memahami peran tokoh masyarakat di Desa Kemiri Barat Kabupaten Batang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah guna mengetahui apakah tokoh masyarakat berperan aktif dalam sistem sosialnya di masyarakat. Fokus utama pada bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menyukseskan penyelenggraan pemilihan kepala daerah di Desa Kemiri Barat. Data penelitian bersumber dari wawancara, observasi dan dokumen terkait. Wawancara dilakukan melalui tokoh masyarakat, pemuda desa dan masyarakat setempat, untuk observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung data dan fakta di Desa Kemiri Barat sebagai subjek tempat penelitian yang berkaitan dengan kondisi dan fenomena disana, sedangkan dokumentasi berupa foto kegiatan terkait dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat maupun denngan masyarakat sekitar. Tahapan penelitian terdiri atas tiga proses, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keakuratan hasil, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi baik dari segi teknik maupun sumber data.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Peran Tokoh Masyarakat sebagai Demokrasi Deliberatif dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada. Peran tokoh masyarakat sebagai demokrasi deliberatif terlihat melalui pemberian ruang bagi

masyarakat, termasuk pemilih muda, untuk menyampaikan pendapat dan membahas kepentingan bersama secara terbuka. Tokoh masyarakat mendorong dialog yang sehat dan rasional berdasarkan data serta fakta lapangan, sekaligus menjadi rujukan utama dalam memberikan informasi yang objektif terkait calon dan penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan bukanlah keputusan sepihak, melainkan keputusan bersama yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.

Peran Tokoh Masyarakat sebagai Konsesnsus Rasional dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada. Peran tokoh masyarakat sebagai konsensus rasional terlihat dari upaya mereka membangun kesepakatan melalui diskusi dan pertukaran argumen yang rasional, inklusif, dan bebas dominasi. Tokoh masyarakat mengarahkan dan mengedukasi pemilih berdasarkan data dan fakta tanpa memaksakan pilihan pribadi, sehingga perbedaan pandangan dapat dijembatani. Dengan perannya sebagai penengah, tokoh masyarakat membantu masyarakat mencapai keputusan bersama untuk menentukan pemimpin yang dianggap paling tepat.

Peran Tokoh Masyarakat sebagai Tindakan Komunikatif dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada.

Peran tokoh masyarakat sebagai tindakan komunikatif tercermin dari upaya mereka membangun interaksi sosial yang bertujuan mencapai pemahaman bersama tanpa kepentingan pribadi. Melalui dialog baik secara pribadi maupun dalam forum, tokoh masyarakat membantu pemilih—baik pemilih muda maupun masyarakat umum—memperoleh informasi dan keterbukaan terkait pemilihan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, warga dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri berbekal informasi yang akurat. Peran Tokoh Masyarakat sebagai Ruang Publik dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada. Artinya arena kehidupan sosial di mana warga Negara atau warga desa bisa berkumpul dan berdiskusi secara bebas tanpa adanya tekanan dalam menyampaikan pendapat dengan determinasi dan

sebagai penghubung antara warga sipil dan Negara. Di lingkungan masyarakat tersedia ruang publik sebagai tempat berdiskusi tokoh masyarakat mengarahkan diskusi secara keterbukaan untuk semua masyarakat baik muda sampai tua. Dengan tetap mengedepankan keputusan bersama, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya di depan publik atas permasalahan untuk nantinya ditanggapi bersama tidak ada penekan dari tokoh tertentu dan orang lain ketika di forum semua berhak mengemukakan pendapatnya walaupun banyak terjadi perbedaan pandangan tetapi tokoh masyarakat sebagai penengah dan salah satu pemberi jalan keluar dengan pengalaman di lapangan.

Peran Tokoh Masyarakat sebagai Kedaulatan Rakyat dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada. Peran tokoh masyarakat sebagai ruang publik terlihat dari kemampuan mereka menyediakan arena diskusi yang bebas dan terbuka bagi seluruh warga tanpa tekanan. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan perbedaan pandangan, sementara tokoh masyarakat berperan sebagai penengah yang mengarahkan dialog menuju keputusan bersama. Keteladanan dan pengalaman tokoh masyarakat membantu memastikan bahwa diskusi berjalan konstruktif dan tetap berorientasi pada kepentingan bersama dalam penyelenggaraan pemilihan.

Peran Tokoh Masyarakat sebagai Legitimasi Kekuasaan dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Peran tokoh masyarakat sebagai legitimasi kekuasaan tampak dari kepercayaan warga terhadap integritas, pengalaman, dan keteladanan yang mereka miliki. Tokoh masyarakat berperan dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai urgensi memilih pemimpin yang memiliki integritas moral, sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan dilakukan secara legal dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dengan demikian, mereka membantu masyarakat bersikap lebih selektif dan bijak dalam menentukan pilihan politiknya. Kendala yang dihadapi tokoh masyarakat adalah kurangnya pendekatan yang intens kepada warga, khususnya pemilih muda

yang cenderung enggan mencari informasi mendalam terkait pemilihan dan lebih mengandalkan pengetahuan sendiri. Sebagian pemilih muda hanya meminta informasi ketika mereka membutuhkan, sehingga komunikasi dengan tokoh masyarakat sering terjadi dalam forum formal. Selain itu, tokoh masyarakat juga belum sepenuhnya proaktif memberikan informasi di luar forum, sehingga pemahaman masyarakat tidak merata.

Penutup

Peningkatan kemandirian siswa merupakan upaya penting dalam memajukan pendidikan, dan guru. Berdasarkan penelitian, dapat ditarik kesimpulan Peran Tokoh Masyarakat sebagai; Pertama, Demokrasi Deliberatif dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Terlihat melalui penyediaan ruang publik untuk berdiskusi serta kemampuan mereka mendorong keterbukaan berpikir dan dialog yang sehat. Tokoh masyarakat juga menjadi panutan dan sumber informasi yang membantu warga mencapai keputusan bersama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kedua, Konsensus Rasional dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Terlihat dari upaya mengarahkan dialog, baik di dalam maupun di luar forum, pada pemikiran yang logis dan sesuai fakta data. Hal ini membantu masyarakat menerima informasi secara terbuka serta mengikuti arahan yang diberikan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Ketiga, Tindakan Komunikatif dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Terlihat dari interaksi yang erat antara tokoh dan warga, di mana tokoh menjadi tokoh utama dalam memperoleh informasi terkait kondisi, calon, dan proses penyelenggaraan pemilihan. Dialog yang terarah membantu masyarakat memahami situasi secara lebih mendalam serta meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Keempat, Ruang Publik dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Terlihat dari adanya ruang publik atau ruang diskusi di lingkungan desa masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya di depan umum tanpa adanya tekanan dari

pihak manapun. Melalui pertukaran pendapat yang terbuka, berbagai isu dapat dibahas bersama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kelima, Kedaulatan Rakyat dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Masyarakat diberikan kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya sesuia dengan pilihanya masing-masing. Dengan memastikan tidak adanya tekanan dari pihak mana pun, tokoh masyarakat membantu menciptakan proses pemilihan yang lebih mandiri dan demokratis. Keenam, Legitimasi Kekuasaan dalam Menyuksskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Terlihat dari kemampuannya menyalurkan aspirasi warga melalui forum atau wadah yang tersedia untuk kemudian ditindaklanjuti. Sebagai perwakilan yang dipercaya, tokoh masyarakat memastikan aspirasi tersebut diteruskan dan mendapat perhatian pada tingkat yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Darmawan, Z. (2018). "Keterlibatan Tokoh Meelayu dalam Pilkada di Kota Palembang Sumatera Selatan." Jurnal Ta`limat, Budaya, Agama Dan Humaniora, 22(2), 59–72.

Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). "Partisipasi Poolitik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Peerapakan Kabupaten Sambas". Jurnal Pendidikan PKN, 2(1), 37–51.

Jupendri. (2021). "Urgensi Partisipasi Pemilih Generasi Y Dan Z pada Pemilihan Kepala Daaerah di Provinsi Riau". Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, Dan Terapan, 1(1), 105–112.

Khakim, M. S., (2023). "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024". Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 4(1), 98–116.

Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). "Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020". Jurnal Academia Praja, 3(2), 168–181.

Sumual., Telly, S. & Siar, L. (2021). "Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016". Jurnal Hukum, 2(6), 784–808.

Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2022). "Peran Pemilih Muda dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilu". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 115–122.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. In Undang-Undang Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 32 Tahun 2004. In Undang-Undang Republik Indonesia.

Windisari, Y., & Wahyuliana, I. (2022). "Tahta Extended Family dalam Bias Politik Kekerabatan". Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 15(1), 53–65.